



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Simpursiang No. 27. Telp. (0473) 21003

M A S A M B A



DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang amanah (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah.

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Secara umum Dinas Perhubungan, telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang signifikan. Pelaksanaan Kinerja pada Tahun 2017 Dinas Perhubungan, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp.8.489.170.100,-** dengan dana yang terealisasi sebesar **Rp.8.261.426.788,-**

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2017 secara umum menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara telah dapat melaksanakan Visi, Misi, Sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal – hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya. Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, ini disampaikan untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya manusia meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi akhir kinerja Dinas Perhubungan, Tahun 2017 secara keseluruhan cukup memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan peraturan pemerintah yang handal professional guna terwujudnya kenyamanan transportasi dan masyarakat informasi di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam rangka implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa Pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Data – Data Sarana lalu Lintas yaitu :

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memotori pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan, mengupayakan berbagai terobosan program pembangunan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Sejak diberlakukannya otonomi Daerah, Bidang Perhubungan mengalami tantangan tersendiri dalam penetapan kebijakan karena letak ruas jalan menerus berada di beberapa kabupaten/kota. Berbagai bentuk koordinasi harus tetap dilaksanakan baik secara vertikal kelembagaan maupun melalui Pemerintah Daerah masing – masing.

Dinas Perhubungan, berupaya memberikan pelayanan yang efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antara lain dengan penyediaan sarana Dan Prasarana Perhubungan guna keselamatan Transportasi angkutan Jalan,Laut dan Sungai dan Beroperasinya, Bandara Andi Jemma Masamba yang diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan sekitarnya, untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat tersebut dan berbagai kegiatan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja yang dibuat pada awal tahun 2017, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja

dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Transportasi dan sumber daya manusia merupakan modal utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan modal lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan system transportasi jalan yang berkuwalitas dan merata, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara. Namun dalam pelaksanaan untuk mencapai dan menciptakan visi dan misi transportasi jalan yang sesuai harapan masih sangat sulit dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi.

Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Teknologi Informasi
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi
3. Kurangnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan
4. Rendahnya penegakan hukum di bidang perhubungan (law enforcement)
5. Belum berfungsinya Terminal angkutan darat
6. Belum berfungsinya Pelabuhan rakyat Munte
7. Belum optimalnya registrasi sarana perhubungan laut

B. Profil Kelembagaan

Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Dinas Perangkat Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

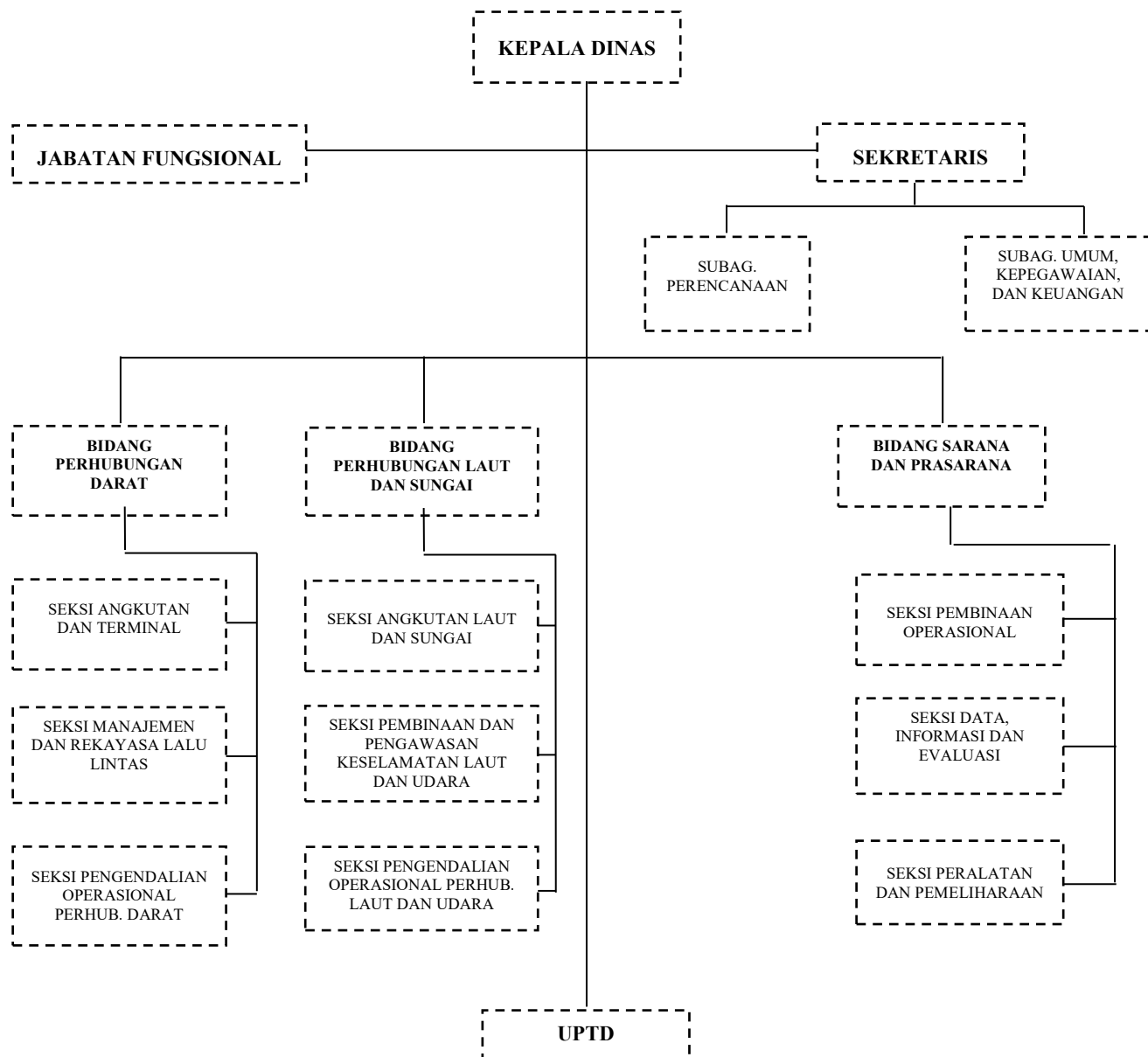
Dinas Perhubungan, adalah membantu Bupati dalam hal merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengerahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, .

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dinas;
- b. Penyusunan rencana strategis dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan, ;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN LUWU UTARA**



MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Maksud penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja adalah untuk mempertanggungjawabkan Kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan merupakan umpan balik peningkatan kinerja Pemerintah dimasa mendatang.

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini memberikan gambaran pada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2017. Dan diharapkan adanya masukan – masukan yang bermanfaat dan alternative pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, .

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dapat diuraikan masing – masing BAB sebagai berikut :

- BAB. I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama Dinas Perhubungan, yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja
Bab ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran yang berjalan
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- BAB IV : Penutup
Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja
2. Dan lain – lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan, terangkum dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. Dimana program yang telah ditentukan merupakan program – program unggulan dan menjadi prioritas SKPD sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dalam sistem laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk penilaian pengukuran kinerja.

Perencanaan strategis sangat terkait dengan sumber daya manusia untuk dapat memenuhi keinginan *stakeholder* dengan menjawab tentang perkembangan lingkungan baik nasional maupun global.

Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi, misi, tujuan sasaran, program dan kegiatan.

Visi menggambarkan kemana suatu organisasi akan dibawah, sedang misi menggambarkan posisi organisasi saat ini.

1. Visi Dan Misi

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kab .Luwu Utara tersusunlah Visi dan Misi Dinas Perhubungan, 2016 – 2021 adalah:

VISI :

“Mewujudkan Tata Kolola Transportasi yang Berkualitas dan Merata”.

Misi :

- 1. Meningkatnya tata kelola transportasi yang baik, tertib, aman, dan lancar**
- 2. Meningkatnya kualitas layanan publik**
- 3. Meningkatnya dan berkembangnya pemanfaatan sarana transportasi**
- 4. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronasi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terhadap pembuatan regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, pemenuhan infrastuktur, serta peningkatan perencanaan dan keamanan transportasi.**

Dalam dokumen RPJMD program pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan adalah:

1. Pembangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
5. Program pelayanan kedinasan
6. Program Pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi LLAJ
8. Program Peningkatan pelayanan angkutan
9. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
11. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Selain program kegiatan tersebut diatas direncanakan pula beberapa terobosan yang diharapkan akan memberikan daya ungkit tinggi bagi percepatan pencapaian sasaran pembangunan, antara lain :

1. Pembangunan Pelabuhan Munte, yang bisa memberikan dampak positif untuk memperlancar arus perekonomian khususnya angkutan laut dan sungai baik barang maupun orang.
2. Bekerjasama dengan pihak terkait menambah frekwensi penerbangan yaitu maskapai penerbangan pesawat dari bandara Andi Jemma Masamba ke jurusan Bandara Seko dan Rampi.

Dari rumusan program dan kegiatan yang terangkum dalam RPJMD menjadi salah satu dasar untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu, bulanan, semesteran dan tahunan.

❖ Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan misi kesatu : Meningkatnya tata Kelola transportasi yang , baik, tertib aman dan lancar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase sarana dan prasarana perhubungan - Jumlah sarana dan prasarana terpelihara - Jumlah Halte Bus - Jumlah rambu – rambu lalu lintas - Panjang Marka Jalan - Jumlah Pelabuhan Tambat Labu
		Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor -Jumlah pemeliharaan gedung kantor -Jumlah kendaraan dinas -Jumlah pemeliharaan meubiler -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

❖ Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan misi kedua : Meningkatnya kualitas layanan publik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas layanan publik yang cepat dan bermutu	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah operasi penertiban kendaraan - Jumlah data base kendaraan bermotor - Jumlah perizinan bidang laut - Jumlah Pengukuran Perahu nelayan - Jumlah Alat pengujian kendaraan bermotor

❖ Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan misi ketiga : Meningkatnya dan berkembangnya pemamfaatan sarana transportasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan dan mengembangkan sarana transportasi	Terselenggaranya sistem transportasi yang handal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang terbangun - Jumlah Sarana Alat Uji kendaraan bermotor yang terpelihara

❖ Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan misi Ketiga : Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terhadap pembuatan regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pemunahan infrastruktur, peningkatan perencanaan dan keamanan transportasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti -Jumlah aparat yang ikut bimtek - persentase laporan capaian kinerja ihktisar realisasi kinerja SKPD

Penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Tahun 2016 – 2021 disusun suatu rencana Kinerja setiap Tahunnya. Ini merupakan penjabaran Target Kinerja yang harus dicapai dalam satu Tahun pelaksanaannya.

Strategi untuk mencapai masing – masing tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator – indikator untuk mencapai target kinerja dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja adalah salah satu dokumen perencanaan yang dapat dipakai mengukur Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen Perencanaan Tahunan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara dapat menyusun dokumen Sistem Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja yang disusun sebagai Rencana Kerja Tahunan dengan maksud program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terukur dan dapat dicapai.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi rencana kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 dapat kita lihat sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2017

Agar sasaran yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2017 sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tertib administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Terwujudkan laporan kinerja administrasi pemerintahan	Status laporan kinerja kategori baik	B
Mewujudkan system transportasi yg tertib,aman,nyaman dan lancer	Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalulintas dan angkutan	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Persentase pembangunan terminal Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang Jumlah warning light yang terpasang	50% 65% 100 unit 3
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Jumlah kendaraan bermotor yang di uji Jumlah perizinan bidang laut Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor Jumlah perahu nelayan yang diukur	1200 kendaraan 250 unit perahu 24 kali 30 unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan indikator kinerja dengan realisasinya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- Indikator masukan (*input*) merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang dimaksud adalah dana dengan satuan rupiah serta personil yang diukur dengan satuan uang.
- Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan dicapai dari kegiatan berupa fisik atau non fisik.
- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini relative (%) dan bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab dari tujuh sasaran yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap 4 (empat) sasaran selama Tahun 2017 sasaran capaiannya rata – rata baik, dimana sasaran capaian sama dengan target.

Dibawah ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2017 dan analisis capaiannya.

Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Indikator Sasaran			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat	Tepat	100%

Pencapaian Indikator :

Untuk mencapai Indikator ini dilaksanakan melalui pembuatan laporan keuangan atau neraca keuangan indicator sasaran laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP pada tahun 2017 target tepat dan realisasi tepat sehingga program dari capaian target 100 % .

Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Indikator Sasaran			
Terwujudnya Laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	B	B	100%

Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator sasaran status laporan kinerja kategori baik pada tahun 2017 target B dan realisasi B, walau program dari capaian target B tetapi itu semua masih perlu adanya perbaikan untuk dapat tetap mencapai target tersebut.

Pencapaian Indikator :

Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Indikator Sasaran			
Meningkatnya sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	95	98	103.16%
	Persentase pembangunan terminal	65%	65%	100%
	Jumlah pembangunan rambu-rambu sungai	40 unit	-	
	Jumlah pembangunan dermaga mini	1	-	

Jumlah pembangunan halte	5	-	
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	103	103	100%
Panjang marka jalan	2000 m	-	
Jumlah pagar pengaman	3000m	-	100%
Jumlah Warning Light yang terpasang	3	3	
Jumlah portal yang terpasang	35	-	
Jumlah bus sekolah	1	-	
Jumlah Rppj yang terpasang	45	-	
Jumlah papan nama jalan yang terpasang	200	-	
Jumlah kendaraan patwal	-	-	
Jumlah kendaraan BM	2	-	
Jumlah rambu-rambu suar yang terpasang	3	-	
Persentase pembangunan dermaga rakyat munte	85%	-	
Jumlah Speed Bood	1	-	

Pencapaian Indikator :

Untuk mencapai indikator ketiga ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, pengadaan rambu – rambu, pengadaan warning Light dan persentase pembangan termina indikator ini mencapai target 100%. Tapi naun masih ada beberapa capaian indikator yang belum tercapai dan tidak terlaksana karna tidak di anggarkan, disebabkan karna kurangnya alokasi anggaran.

Untuk mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar harus didukung sarana dan prasarana yang memadai supaya arus lalu lintas semakin baik dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas

Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Indikator Sasaran			
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	1700	2000	117,65%
	Jumlah operasi penertiban kendaraan	24 kali	24 kali	100%
	Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	-	-	
	Jumlah data base kendaran bermotor	3100	-	
	Jumlah perizinan bidang laut	500 unit	60 unit	12%
	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu nelayan	520 unit	25 unit	4,81%
	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban perparkiran	62 kali	62 kali	100%
	Jumlah kendaraan bermotor yang di uji	2000 unit	2235 unit	186%
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	100 unit	100 unit	100%
Jumlah peraturan yang di keluarkan	1 perda	-	0	

Pencapaian Indikator :

Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator capaian rata – rata baik . hal ini tercapai karena personil langsung turun kelapangan mengadakan uji keliling sehingga jumlah kendaraan yang di uji melampaui dari target (over)di setiap kecamatan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan pengukuran kapal motor dan perahu nelayan dan perizinan bibang laut tidak tercapai sesuai target karna pencapaian targetnya telalulu tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat pengguna perahu/kapal bermotor unutup mengurus

perizinan dan sebahagian perahu nelayan sudah ada yang tidak aktif atau rusak. Dan dari sekian indikator juga masih ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karna kurangnya alokasi anggaran.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap 4 (empat) sasaran dan perbandingannya dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sasaran capaiannya rata – rata baik, dimana sasaran capaian sama dengan target.

Dibawah ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan analisis capaiannya.

Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1		Tahun 2016	Tahun 2017
Uraian	Indikator Sasaran		
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat	Tepat

Pencapaian Indikator :

Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini pada tahun 2016 dan tahun 2017 sama pencapaiannya.

Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		Tahun 2016	Tahun 2017
Uraian	Indikator Sasaran		
Terwujudnya Laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	CC	B

Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator sasaran status laporan kinerja kategori baik pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian targetnya sama sehingga kita perlu memperdalam

pengetahuan cara membuat laporan yang baik sehingga kita dapat mencapai target yang diinginkan.

Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3		Tahun 2016	Tahun 2017
Uraian	Indikator Sasaran		
Meningkatnya sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	45 kasus	45 kasus
	Jumlah sarana dan prasarana terminal	-	1 paket
	Jumlah pembangunan dermaga mini	3	-
	Jumlah pembangunan halte	4	-
	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	100	100
	Panjang marka jalan yang terpasang	6906	-
	Panjang pagar pengaman jalan	-	-
	Jumlah warning light yang terpasang	-	3
	Jumlah portal yang terpasang	-	-
	Jumlah bus sekolah	-	-
	Jumlah RPPJ yang terpasang	4	-
	Jumlah papan nama jalan yang terpasang	-	-
	Jumlah kendaraan patwal	-	-
	Jumlah kendaraan BM	-	-
	Jumlah rambu suar yang terpasang	2	-
	Persentase pembangunan dermaga pelabuhan rakyat munte	-	-

Pencapaian Indikator :

Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, pengadaan rambu – rambu dan pengadaan marka jalan, indikator ini ada beberapa kegiatan lebih rendah dibandingkan dari tahun sebelumnya, disebabkan karna kurangnya anggaran yang ada Dinas Perhubungan, .Untuk mewujudkan sistem transportasi yang tertib,

aman, nyaman dan lancar harus didukung sarana dan prasarana yang memadai supaya arus lalu lintas semakin baik dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4		Tahun 2016	Tahun 2017
Uraian	Indikator Sasaran		
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	1700	2000
	Jumlah operasi penertiban kendaraan	24	24
	Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	-	-
	Jumlah data base kendaraan bermotor	3100	-
	Jumlah perizinan bidang laut	60 unit	60 unit
	Jumlah pengukuran kapal motor perahu nelayan	25	25
	Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor, pengawasan jalan daerah, penertiban perparkiran	62 kali	62 kali
	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	-	-
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	100	100
	Jumlah peraturan yang di keluarkan	-	-

Pencapaian Indikator :

Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator capaian rata – rata baik . hal ini tercapai karena personil langsung turun kelapangan mengadakan uji keliling di setiap kecamatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah.

Masih ada beberapa kegiatan yang belum tercapai targetnya sampai dengan tahun 2017. Karena kurangnya alokasi anggaran.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyelenggaraan sektor Perhubungan khususnya transportasi darat maupun laut dan sungai, udara telah berjalan dengan baik, tertib dan aman dalam mendorong kegiatan pembangunan sektor – sektor lain terkait dengan upaya meningkatnya mobilitas orang, barang dan jasa. Namun demikian Dinas Perhubungan, Kabupaten Luwu Utara masih menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Belum meratanya penyediaan prasarana transportasi diseluruh Kecamatan
2. Tingkat disiplin para pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan masih relatif rendah sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih terjadi
3. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) bidang perhubungan untuk menunjang kelancaran tugas Dinas.

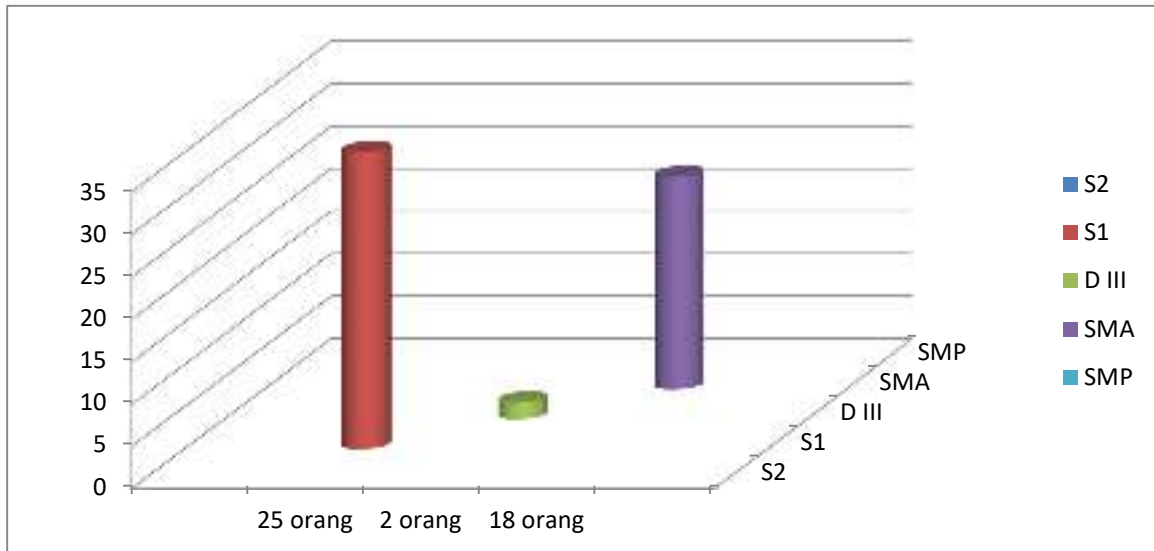
Langkah – langka pemecahan masalah dari semua itu penyelenggaraan transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sasaran pembangunan sektor transportasi diarahkan kepada upaya – upaya untuk memecahkan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui penyediaan sarana transportasi dan pembangunan berbagai prasarana perhubungan yang memadai
2. Mengurangi angka kecelakaan dengan cara memeriksa kendaraan bermotor di jalan dan menambahkan perlengkapan jalan yang dapat memperingati pengemudi yang berlalu lintas di kawasan rawan kecelakaan
3. Melakukan manajemen lalu lintas dan menyusun kebijakan untuk sarana prasarana lalulintas jalan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini BKD terkait masalah SDM

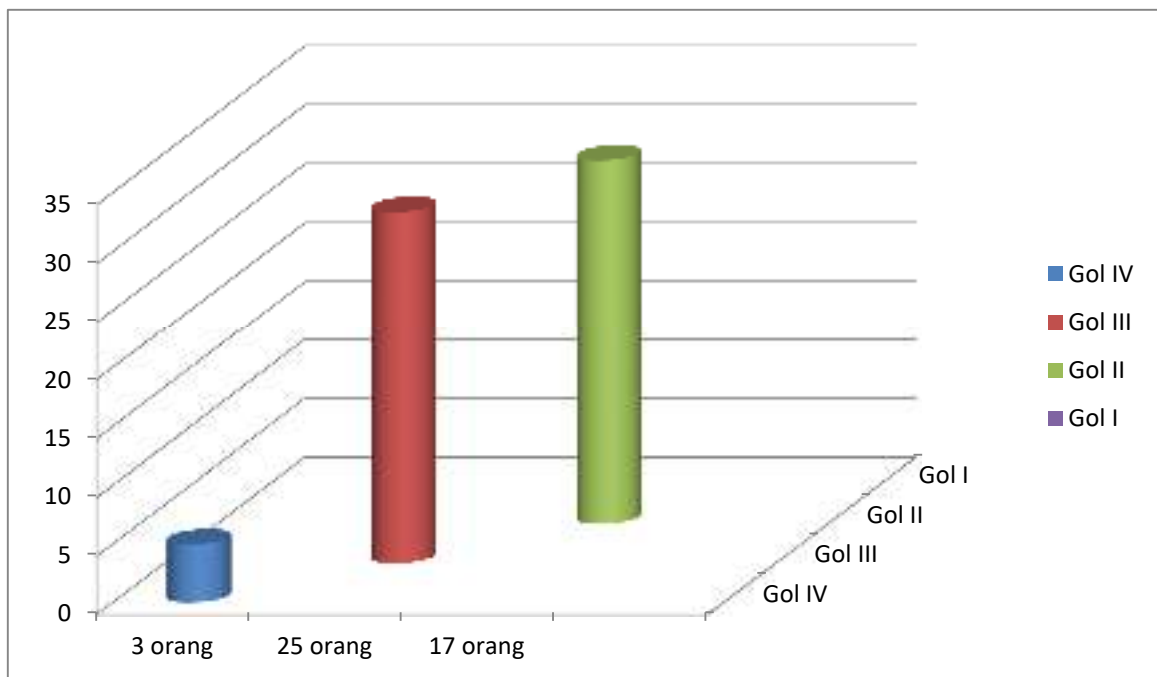
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan, Kab.Luwu Utara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dari Tenaga Organik dan Pegawai Honorer dengan kondisi sebagai berikut :

- **Menurut Tingkat Pendidikan :**

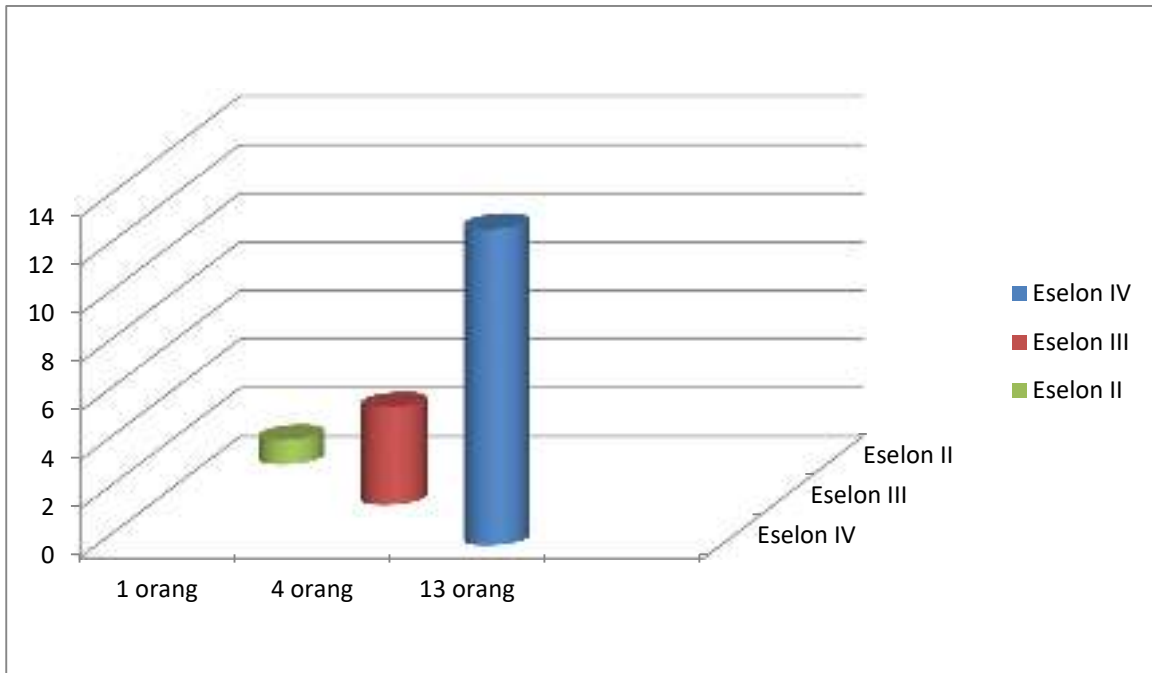


- **Menurut Pangkat Dan Golong**

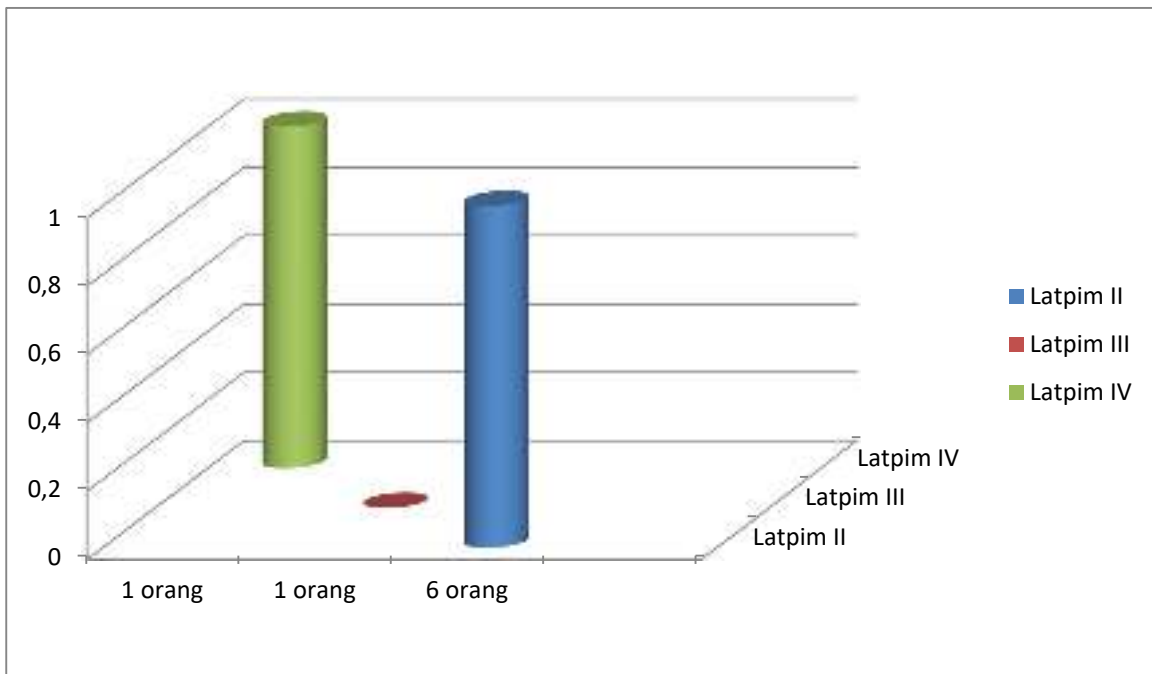


- **S**

truktural :



MENURUT DIKLAT STRUKTURAL :



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan harus didukung dengan yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya pada Tahun 2017 sumber dana Dinas Perhubungan.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 menggunakan APBD dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.908.985.000	Rp.2.857.348.918	Rp. 51.636.082
2	Belanja Langsung Umum	Rp. 5.580.185.100	Rp.5.762.219.370	Rp.176.107.230
	JUMLAH	Rp.8.489.170.100	Rp.8.261.426.788	Rp.227.743.312

A. Belanja langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan jasa surat menyurat Rp 2.000.000,- realisasi Rp.2.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,-
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.7.974.000,- realisasi Rp.6.303.790,- sisa anggaran Rp.1.670.210,-
- c) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp.34.615.000,- realisasi Rp.33.341.285,- sisa anggaran Rp.1.273.715,-
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp.38.800.000 realisasi Rp.28.800.000,- sisa anggaran Rp.10.000.000,-
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp.4.210.000,- realisasi Rp.4.205.000,- sisa anggaran Rp.5.000,-
- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.9.600.000,- realisasi Rp.9.595.000,- sisa anggaran Rp.5.000,-
- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp.190.000.000,- realisasi Rp.189.961.245,- sisa anggaran Rp.38.755,-
- h) Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian dan asset Rp.555.000.000,- realisasi Rp.531.901.750,- sisa anggaran Rp.23.098.250

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor Rp.239.125.000,- realisasi Rp.230.395.650,- sisa anggaran Rp.8.729.350,-
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.50.018.800,- realisasi Rp.49.998.000,- sisa anggaran Rp.20.800,-
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.78.872.500,- realisasi Rp.78.790.000,- sisa anggaran Rp. 82.500,-
- d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Rp.27.800.000,- realisasi Rp.27.710.000,- sisa anggaran Rp. 90.000,-
- e) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rp.5.000.000,- realisasi Rp.5.000.000,- sisa anggaran Rp.0,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan Rp. 118.000.000,- realisasi Rp. 117.724.700,- sisa anggaran Rp. 275.300,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 51.750.000,- realisasi Rp. 51.672.000,- sisa anggaran Rp. 78.000,-

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

- a) Kunjungan kerja bersama bupati/wakil bupati/DPRD/muspida.pejabat pemerintah tingkat atas/ unit kerja terkait Rp.32.656.450,- realisasi Rp.32.600.000,- sisa anggaran Rp.56.450,-

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- a) Penyusunan kebijakan, norma, standard an prosedur bidang Perhubungan Rp.27.363.250,- realisasi Rp.27.363.250,- sisa anggaran Rp.0,-

7. Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- a) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rp. 163.973.800,- realisasi Rp.163.721.000,- sisa anggaran Rp.252.800,-

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a) Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Rp.825.550.000 realisasi Rp.818.783.700,- sisa anggaran Rp.6.766.300,-
- b) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Rp.178.566.300,- realisasi Rp.178.382.000,- sisa anggaran Rp.184.300,-
- c) kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Rp.149.500.000,- realisasi Rp.149.215.000,- sisa anggaran Rp.285.000,-
- d) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Rp.112.400.000,- realisasi Rp.111.995.000,- sisa anggaran Rp.405.000,-
- e) Fasilitas perijinan di bidang perhubungan Rp.65.100.000,- realisasi Rp.64.757.000,- sisa anggaran Rp.343.000,-

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a) Pembangunan gedung terminal Rp.2.276.635.000 realisasi Rp.2.167.705.000,- sisa anggaran Rp.108.930.000,-
- b) Retensi pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Rp.11.985.000,- realisasi Rp.11.985.000,- sisa anggaran Rp.0,-
- c) Retensi pembangunan sarana parkir kendaraan bermotor Rp.7.500.000,- realisasi Rp.7.500.000,- sisa anggaran Rp.0,-

10. Program Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas

- a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rp. 284.700.000,- realisasi Rp. 271.192.500,- sisa anggaran Rp.13.507.500,-
- b) Retensi pembangunan lampu petunjuk muara sungai Rp.19.500.000,- realisasi Rp.19.490.000,- sisa anggaran Rp.10.000,-
- c) Retensi pengadaan pelabuhan tambak labu Rp.11.990.000,- realisasi Rp.11.990.000,- sisa anggaran Rp.0,-

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab – Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 yaitu :

1. Dinas Perhubungan, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Perhubungan, telah berusaha secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan Pengelolaan PAD untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Utara kemudian ditetapkan menjadi Visi Bupati / Wakil Bupati Luwu Utara.
2. Untuk mencapai Visi sesuai target sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu disusun beberapa program dan kegiatan yang hasilnya dapat di ukur berdasarkan indicator yang telah ditetapkan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Bupati Luwu Utara.
3. Adapun ketidakberhasilan pencapaian target dari beberapa indikator disebabkan karena keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas dan diharapkan Tahun – Tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan lagi.

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan, harus dipertanggungjawabkan setiap Tahun dalam bentuk Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2017 yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja ini disusun dan merupakan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan, selama Setahun dan diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Masamba, Februari 2018

KEPALA DINAS,

EKA RUSLI, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip :19710414 199203 1 009

**L
A
M
P
I
R
A**

N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

